

# RENJA

20  
26

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213  
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan\_tmg@yahoo.com

**VERIFIKASI****RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator Pada  
tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan,

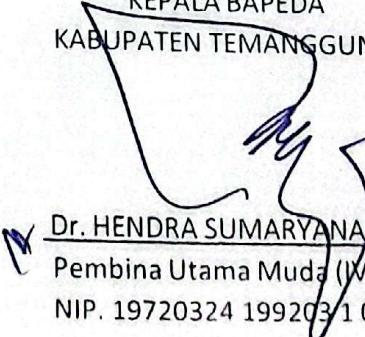
  
EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM  
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator,

  
DWI LESTARI, ST.  
NIP. 19940916 202202 2 001

Mengetahui,

KEPALA BAPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
Dr. HENDRA SUMARYANA, MT  
Pembina Utama Muda (W/c)  
NIP. 19720324 1992031 003

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan Keschatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Renja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disertai dengan penetapan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, program dan kegiatan, kerangka pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini masih banyak dijumpai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Sekretariat DPRD ini, terutama apabila dilakukan review atas Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ini dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam Upaya mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**DAFTAR ISI****BAB I Pendahuluan**

<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Landasan Hukum .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>13</b>

**BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD**

<b>2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029 .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....</b>	
<b>2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ( IKPD ).....</b>	<b>35</b>
<b>2.2.2 Data Pokok .....</b>	<b>39</b>
<b>2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD .....</b>	<b>52</b>
<b>2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....</b>	<b>54</b>
<b>2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....</b>	<b>59</b>
<b>2.6 Inovasi Perangkat Daerah .....</b>	<b>60</b>
<b>2.7 Penghargaan .....</b>	<b>60</b>

**BAB III Tujuan , Sasaran , Program , Kegiatan**

<b>3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....</b>	<b>61</b>
<b>3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD .....</b>	<b>61</b>

**BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan**

<b>4.1 Program dan Kegiatan .....</b>	<b>64</b>
---------------------------------------	-----------

<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

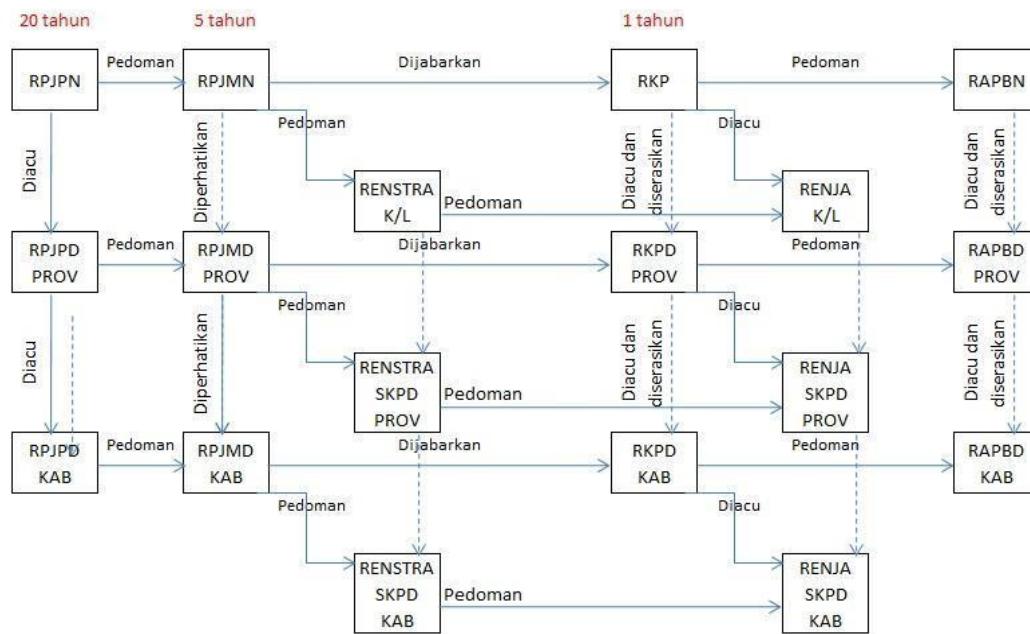
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.





**Gambar 1.1  
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat DPRD, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD;
- 2) Kondisi pelayanan Sekretariat DPRD;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD;
- 4) Data Pokok Pembangunan Sekretariat DPRD
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat DPRD;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat DPRD

**b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat DPRD untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2026, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2026;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat DPRD.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu berdasarkan renstra Sekretariat DPRD**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Sekretariat DPRD

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Sekretariat DPRD
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat DPRD.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi (Sekretariat DPRD) dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja (Sekretariat DPRD);**

Penyusunan dokumen rancangan Renja (Sekretariat DPRD) merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja (Sekretariat DPRD);**

Penyempurnaan rancangan Renja (Sekretariat DPRD) perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

#### **1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja (Sekretariat DPRD) dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

#### **m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja (Sekretariat DPRD) dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja (Sekretariat DPRD) yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja (Sekretariat DPRD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
  13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) (Sekretariat DPRD) Tahun 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja (Sekretariat DPRD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN  
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA (Sekretariat DPRD)  
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN  
BAB IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun kesatu pelaksanaan Renstra (Sekretariat DPRD 2025-2029) telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD  
Tahun 2024

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sekretariat DPRD						53.381.762.875,00	Rp53.495.825.817,00				
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						53.381.762.875,00	Rp53.495.825.817,00				
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						53.381.762.875,00	Rp53.495.825.817,00				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan administrasi keuangan,umum ,dan jasa penunjang perangkat daerah					32.000.881.724,00	Rp31.391.732.066,00		29.564.568.484		94,2

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						2.579.999.110,00	Rp2.459.329.452,00		2.372.636.174		96,5
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2.579.999.110,00	Rp2.459.329.452,00		2.372.636.174		96,5
	<b>Administrasi umum Perangkat daerah</b>						638.446.500,00	Rp663.316.500,00		555.678.540		83,8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10.000.000,00	Rp13.000.000,00		11.840.500		91,1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					30.933.500,00	Rp30.933.500,00		17.686.200		57,2

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					22.550.000,00	Rp22.550.000,00		21.887.900		97,1
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan					15.000.000,00	Rp36.870.000,00		31.539.000		85,5
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					110.000.000,00	Rp110.000.000,00		93.373.000		84,9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					449.963.000,00	Rp449.963.000,00		379.351.940		84,3
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						0,00					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan										



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		mesin lainnya yang disediakan										
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan										
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						807.933.494,00	Rp835.808,49 4,00		743.274.210		88,9
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.760.000,00	Rp9.985.000,0 0		7.426.500		74,4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					110.000.000,00	Rp125.000,00 0,00		102.151.179		81,7
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					689.173.494,00	Rp700.823,49 4,00		633.696.531		90,4



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						988.785.740,00	Rp939.060.740,00		672.658.838		71,6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					753.785.740,00	Rp676.545.740,00		466.526.738		68,9
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					85.000.000,00	Rp91.700.000,00		73.939.600		80,6
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					125.000.000,00	Rp130.915.000,00		100.421.000		76,7



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					25.000.000,00	Rp39.900.000,00		100.421.000		251,6
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>						26.013.948.380,00	Rp25.522.448.380,00		24.392.468.722		95,6
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD					25.332.948.480,00	Rp24.867.948.480,00		23.894.470.309		96,1
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan					590.999.900,00	Rp564.499.900,00		466.110.000		82,6
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD					90.000.000,00	Rp90.000.000,00		31.888.413		35,4
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>						971.768.500,00	Rp971.768.500,00		827.852.000		85,2



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					100.068.500,00	Rp100.068.500,00		65.941.000		65,9
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan					282.000.000,00	Rp282.000.000,00		235.000.000		83,3
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas Persentase kegiatan DPRD yang di publikasikan Persentase kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana					21.380.881.151,00	Rp22.104.093.751,00		12.987.495.282		58,7
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun					4.243.781.300,00	Rp4.605.631.300,00		2.786.402.712		60,5



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					2.250.298.800,00	Rp2.492.148.800,00		1.560.737.900		62,6
	Penyelenggaraan Kajian Perundang - undangan	Jumlah Dokumen kajian Perundang -Undangan					505.302.500,00	Rp625.302.500,00		209.968.000		33,6
	Fasilitas Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi					1.488.180.000,00	Rp1.488.180.000,00		1.015.696.812		68,2
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Jumlah dokumen anggaran					799.030.000,00	Rp709.030.000,00		430.839.000		60,8
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS					261.687.000,00	Rp261.687.000,00		164.560.000		62,9
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan					261.691.000,00	Rp171.691.000,00		86.504.000		50,4



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Perubahan KUA dan										
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD					137.826.000,00	Rp137.826.000,00		87.410.000		63,4
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan					137.826.000,00	Rp137.826.000,00		92.365.000		67,1
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan					184.000.000,00	Rp184.000.000,00		10.800.000		5,87
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					44.000.000,00	Rp44.000.000,00		3.400.000		7,72
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan					44.000.000,00	Rp44.000.000,00		1.800.000		4,1



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bidang Infrastruktur										
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					44.000.000,00	Rp44.000.000,00		3.300.000		7,5
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					52.000.000,00	Rp52.000.000,00		2.300.000		4,42
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					3.651.090.851,00	Rp3.699.520.851,00		2.776.492.529		75,1
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD					2.827.544.500,00	Rp2.827.544.500,00		2.019.048.454		71,4
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					222.171.700,00	Rp222.171.700,00		219.215.432		98,7



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					166.337.151,00	Rp214.767.151,00		200.145.143		93,2
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Jumlah Aspirasi yang dapat ditindak lanjuti					1.597.211.000,00	Rp1.214.211.000,00		1.085.356.000		89,4
	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun					125.000.000,00	Rp125.000.000,00		69.964.500		55,9
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					1.472.211.000,00	Rp1.089.211.000,00		1.015.391.500		93,2
	<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>	Percentase anggota DPRD yang difasilitasi					10.905.768.000,00	Rp11.691.700.600,00		5.897.605.041		50,4
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					10.905.768.000,00	Rp11.691.700.600,00		5.897.605.041		50,4

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD  
s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sekretariat DPRD						51.202.595. 629,00	48.962.662. 482,00		18.788.529. 008,00		18.788.52 9.008,00		38,4
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						51.202.595. 629,00	48.962.662. 482,00		18.788.529. 008,00		18.788.52 9.008,00		38,4
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						51.202.595. 629,00	48.962.662. 482,00		18.788.529. 008,00		18.788.52 9.008,00		38,4
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan administrasi keuangan,umum, dan jasa penunjang perangkat daerah					31.521.979. 724,00	35.398.636. 174,00		15.360.214. 611,00		15.360.21 4.611,00		43,4
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						2.579.999.1 10,00	2.579.999.1 10,00		1.248.893.6 23,00		1.248.893. 623,00		48,4



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2.579.999,1 10,00	2.888.934,1 23,00		1.248.893,6 23,00		1.248.893, 623,00		43,4
	<b>Administrasi umum Perangkat daerah</b>						640.115,300 ,00	614.380.300 ,00		135.783,797 ,00		135.783,7 97,00		22,2
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10.000.000, 00	7.000.000,0 0		2.408.000,0 0		2.408.000, 00		34,4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					27.602.300, 00	21.722.270, 00		3.680.000,0 0		3.680.000, 00		16,9

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					22.550.000,00	13.530.000,00		2.675.000,00		2.675.000,00		19,8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan					20.000.000,00	20.000.000,00		7.950.000,00		7.950.000,00		39,8
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					110.000.000,00	75.838.500,00		42.781.000,00		42.781.000,00		56,4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					449.963.000,00	224.987.300,00		76.289.797,00		76.289.797,00		33,4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00	185.735.000,00		0,00		0,00		0

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					50.000.000,00	74.083.000,00		0,00		0,00		0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					50.000.000,00	0,00						
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						910.888.694,00	888.088.694,00		409.373.619,00		409.373,619,00		46,09
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.760.000,00	7.080.000,00		3.524.900,00		3.524.900,00		49,8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					110.000.000,00	110.000.000,00		45.965.690,00		45.965.690,00		41,8

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					792.128.694 ,00	749.137.797 ,00		359.883.029 ,00		359.883.029 ,00		48,03
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						894.959.740 ,00	834.959.740 ,00		161.879.729 ,00		161.879.729 ,00		19,4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					659.959.740 ,00	550.735.766 ,00		135.126.399 ,00		135.126.399 ,00		24,5
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					85.000.000, 00	83.474.300, 00		4.682.000, 0		4.682.000, 00		5,60



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					125.000.000,00	93.096.400,00		21.791.330,00		21.791.330,00		23,4
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					25.000.000,00	24.952.007,00		280.000,00		280.000,00		1,12
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>						26.013.948.380,00	30.096.301.211,00		13.244.516.843,00		13.244.516.843,00		44,1
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD					25.332.948.480,00	29.415.301.311,00		13.227.802.843,00		13.227.802.843,00		44,5



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025		
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan					590.999.900 ,00	581.762.900 ,00		16.714.000, 00		16.714.00 0,00		2,87
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD					90.000.000, 00	85.700.500, 00		0,00		0,00		0
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>						382.068.500 ,00	382.068.500 ,00		159.767.000 ,00		159.767.0 00,00		41,8
	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					100.068.500 ,00	89.300.000, 00		18.767.000, 00		18.767.00 0,00		21,2
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan					282.000.000 ,00	282.000.000 ,00		141.000.000 ,00		141.000.0 00,00		50
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN</b>	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas Persentase kegiatan DPRD					19.680.615. 905,00	13.564.026. 308,00		3.428.314.3 97,00		3.428.314. 397,00		25,3

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	yang di publikasikan Persentase kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana												
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun					3.640.702,5 30,00	6.272.330,5 00,00		281.950.000 ,00		281.950,0 00,00		4,45
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					2.139.206,6 30,00	1.271.353,1 32,00		281.950.000 ,00		281.950,0 00,00		22,2
	Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan	Jumlah Dokumen kajian Perundang -undangan					505.302.500 ,00	1.835.174,3 00,00		0,00		0,00		0
	Fasilitas Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi					996.193.400 ,00	755.529.600 ,00		0,00		0,00		0

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025		
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		Jumlah dokumen anggaran				638.982.000 ,00	799.030.000 ,00		0,00		0,00		0
	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS				206.505.000 ,00	151.517.800 ,00		0,00		0,00		0
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				206.505.000 ,00	156.239.800 ,00		0,00		0,00		0
	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				112.986.000 ,00	81.927.500, 00		0,00		0,00		0
	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				112.986.000 ,00	82.097.500, 00		0,00		0,00		0
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan				184.000.000 ,00	184.000.000 ,00		15.200.000, 00		15.200.00 0,00		8,26



NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					44.000.000,00	22.000.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00		11,8
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					44.000.000,00	22.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		22,7
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					44.000.000,00	22.000.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		21,8

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025		
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					52.000.000,00	26.000.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		10,8
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					3.338.000,00,00	3.363.938,751,00		1.041.918,897,00		1.041.918,897,00		30,9
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD					2.927.000,00,00	2.201.606,800,00		875.782.000,00		875.782,000,00		39,8
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					225.000.000,00	222.171.600,00		109.613.000,00		109.613,000,00		49,3
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					186.000.000,00	164.258.326,00		56.523.897,00		56.523,897,00		34,4
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Jumlah Aspirasi yang dapat ditindak lanjuti					1.685.225,700,00	1.685.225,700,00		562.223.500,00		562.223,500,00		33,4
	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun					125.000.000,00	85.164.800,00		15.950.000,00		15.950,000,00		18,7

NO	BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI SD TRIWULAN II 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					1.560.225.700,00	1.388.409.850,00		546.273.500,00		546.273.500,00		39,3
	<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>	Persentase anggota DPRD yang difasilitasi					10.193.705.675,00	10.153.150.600,00		1.527.022.000,00		1.527.022.000,00		15,1
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					10.193.705.675,00	5.076.575.300,00		18.788.529.008,00		18.788.529.008,00		370,1

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
  - a. Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah.
  - b. Persentase Jumlah Rancangan, Peraturan Daerah yang dibahas,
  - c. Persentase kegiatan DPRD yang di publikasikan,
  - d. Persentase Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana.
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - j. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
  - k. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  - l. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
  - m. Pelaksanaan Reses

3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
  - a. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
  - a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
  - c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
  - d. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
  - e. Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
  - f. Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD
  - g. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
5. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi.
  - f. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
  - g. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi** yaitu dengan nilai **100%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas  
Capaian Kinerja : 100,00 %
2. Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Tinggi
3. Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasikan  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Tinggi
4. Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Tinggi

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2026 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

### **2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Triwulan II Tahun 2025 ([Laporan IKPD](#))  
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
1	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	na	100	100	100	100	22,11		22,11					V
2	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	na	100	100	100	100	9,10		9,10					V
3	Persentase kegiatan Pokok-Pokok DPRD dilaksanakan sesuai rencana	%	100	95	95	95	100	100		100	V				

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
4	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	100	100	100	100	38,00		38,00					V
5	Presentase kegiatan peningakatan Kapasitas Anggota DPRD	%	na	100	100	100	100	50,00		50,00					V

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada satu terdiri dari:
  - a. Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah terintegrasi dengan SIPD
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dan komunikasi dengan PD Pengampu terkait
2. Capaian indikator dengan status tercapai ada satu terdiri dari:
  - a. Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah terintegrasi dengan SIPD
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dan komunikasi dengan PD Pengampu terkait.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada empat terdiri dari:
  - a. Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan Agenda Kegiatan setiap bulan melalui Rapat Bamus dilaksanakan tepat waktu
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024-2029 dan adanya beberapa agenda kegiatan yang bersamaan
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat Kelengkapan Dewan
  - b. Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas.

- 1). Faktor Pendorong Indikator Tersebut Adalah adanya Inisiatif dari PD untuk mengusulkan Raperda pada tahun sebelumnya, dengan ditetapkan Propem Perda ( Program Pembentukan Perda Tahun 2023 )
  - 2). Faktor Penghambat Indikator tersebut Adalah harmonisasi yang membutuhkan Proses waktu
  - 3). Rekomendasi Tindak Lanjut indikator tersebut Adalah koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, Bagian Hukum Pemda Kab. Temanggung Biro Hukum Provinsi terkait harmonisasi.
- c. Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan
- 1). Faktor Pendorong Indikator Tersebut Adalah Kemudahan Teknologi dan informasi dalam mempublikasikan kegiatan DPRD
  - 2). Faktor Penghambat Indikator tersebut Adalah kebijakan yang mengatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dewan tidak boleh dipublikasikan
  - 3). Rekomendasi Tindak Lanjut indicator tersebut Adalah menjaga intensitas dan kualitas kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD
- d. Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD
- 1). Faktor Pendorong Indikator tersebut Adalah Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan agenda kegiatan setiap bulan melalui Rapat Bamus dilaksanakan tepat waktu
  - 2). Faktor Penghambat Indikator tersebut Adalah adanya Proses peralihan anggota DPRD periode 2024 – 2029
  - 3). Rekomendasi Tindak Lanjut indicator tersebut Adalah koordinasi dan Kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

### **2.2.2 Data Pokok**

Data Pokok pada Sekretariat DPRD dengan rincian sebagai berikut

1. Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat didefinisikan sebagai ukuran seberapa besar peningkatan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang dihitung dalam bentuk persentase.

Peningkatan dukungan ini dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti :

1. Peningkatan kualitas layanan : Peningkatan kualitas layanan

Yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Peningkatan Efisiensi : Peningkatan efisiensi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang didukung oleh Sekretariat DPRD

3. Peningkatan Efektifitas : Peningkatan efektifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran DPRD yang didukung oleh Sekretariat DPRD.

4. Peningkatan Kepuasan : Peningkatan Kepuasan anggota DPRD terhadap dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Dengan mengukur persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dapat diketahui seberapa besar dampak dari upaya peningkatan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dan area – area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas dukungan.

Rumus= Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD yang terfasilitasi  
x100

Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD

**TABEL 2.4**  
**Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**  
**Tahun 2020 – 2025**

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD yang terfasilitasi	na	na	na	na	na	221

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD	na	na	na	na	na	321
	Total Capaian	na	na	na	na	na	86,06

Sumber: Setwan, 2025

Dilihat dari tabel 2.0 menunjukkan bahwa capaian Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD yang terfasilitasi terhadap Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD adalah 86,06%.

Adapun yang menjadi faktor pendorong adalah Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan agenda kegiatan setiap bulan melalui Rapat Banmus dilaksanakan tepat waktu.

Faktor Penghambat nya adalah adanya kendala teknis internal pemerintah Kabupaten Temanggung juga adanya beberapa agenda kegiatan yang bersamaan.

Upaya pencapaiannya adalah Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

Berikut Data Dukung Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut :

TABEL 2.5

Data dukung Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
Tahun 2025

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

No	ALAT KELENGKAPAN	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN
A.	Pimpinan DPRD	1. Perumusan Kebijakan	12 bulan
		2. Rapat Pimpinan	12 bulan
		3. Koordinasi, Konsultasi, dan Kunjungan Kerja	12 bulan
		4. Menindaklanjuti Aduan Masyarakat	12 bulan
B.	Badan Musyawarah	1. Penyusunan Draft Rencana Kerja	2 Kegiatan
		2. Penyusunan Agenda Kegiatan	12 Kegiatan
		3. Penetapan Jadwal Kegiatan	12 Kegiatan
		4. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa	3 kegiatan
		5. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa	1 Kegiatan
C.	Komisi-Komisi	1. Rapat Internal Komisi	12 kegiatan
		2. Rapat Kerja Komisi dengan Perangkat Daerah	50 kegiatan
		3. Kunjungan Kerja Dalam Daerah Kabupaten	40 Kegiatan
		4. Kunjungan Kerja dalam Provinsi Menginap	8 Kegiatan
		5. Kunjungan Kerja dalam Provinsi Tidak Menginap	2 Kegiatan
		6. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa	6 Kegiatan
		7. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa	1 Kegiatan
		8. Bimbingan Teknis	6 Kegiatan
		9. Reses	3 Kegiatan
D.	Badan Pembentukan Peraturan Daerah	1. Penyusunan Propemperda	2 Kegiatan
		2. Penyusunan Naskah Akademik dan Kajian Akademik	10 Kegiatan
		3. Rapat Bapemperda	4 Kegiatan
		4. Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah	4 Kegiatan
		5. Rapat Kajian Raperda dan Perda	8 Kegiatan
		6. Kunjungan Kerja keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa	3 Kegiatan

No	ALAT KELENGKAPAN	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN
		7. Kunjungan Kerja keluar Provinsi Luar Pulau Jawa	1 Kegiatan
E.	Badan Anggaran	1. Membahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024	1 Kegiatan
		2. Membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	1 Kegiatan
		3. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	1 Kegiatan
		4. Membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	1 Kegiatan
		5. Membahas Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	1 Kegiatan
		6. Membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	1 Kegiatan
		7. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Gubernur Jawa Tengah Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	1 Kegiatan
		8. Membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
		9. Membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
		10. Membahas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
		11. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
		12. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa	3 Kegiatan
		13. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa	1 Kegiatan
F.	Badan Kehormatan	1. Rapat Internal Badan Kehormatan	8 Kegiatan
		2. Evaluasi Kinerja Anggota DPRD	4 Kegiatan
		3. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam	3 Kegiatan

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025

## 2. Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persentase RAPERDA dihitung dengan rumus : jumlah RAPERDA yang dibahas dibagi jumlah RAPERDA yang diterima dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.6

**Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu  
Tahun 2020 s/d 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	Jumlah RAPERDA yang dibahas	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2.	Jumlah RAPERDA yang diterima	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>% RAPERDA yang disahkan tepat waktu</b>	<b>90,48</b>	<b>80,00</b>	<b>88,89</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Faktor Pendorong terkait Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu adalah adanya inisiatif dari Perangkat Daerah untuk mengusulkan Raperda pada tahun sebelumnya dengan ditetapkan Propem Perda ( Program Pembentukan Perda ) Tahun 2025.

Faktor Penghambat nya adalah harmonisasi yang membutuhkan Proses waktu.

Upaya Pencapaian Target Kinerja adalah Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, bagian hukum Pemda Kab. Temanggung, Biro Hukum Provinsi terkait harmonisasi.

TABEL 2.7

*RAPERDA yang disahkan sampai dengan Triwulan III tahun 2025*

<b>No.</b>	<b>Nama Raperda</b>
1.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
2.	Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal
6.	Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
7.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025

## 1. Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Prosentase kegiatan pokok pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana mencapai 100%, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan aspirasi Masyarakat. Kegiatan ini meliputi penyusunan Peraturan Daerah, pengawasan kebijakan pemerintah, dan peningkatan partisipasi Masyarakat. Dengan capaian ini DPRD terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan public dan Pembangunan Daerah.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah pokir DPRD yang terakomodir dalam dokumen pemerintah dibagi jumlah usulan kegiatan pokir DPRD dikali 100%.

Realisasi persentase jumlah pokir DPRD terhadap jumlah raperda dari tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 2.8**  
 Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah  
 Raperda  
 Tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025)

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	Jumlah pokir – pokir DPRD yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	978	893	1331	1332	1025	1613
2.	Jumlah usulan kegiatan pokir DPRD	978	893	1331	1332	1025	1613
<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan III tahun 2025, jumlah pokir – pokir DPRD yang terakomodir dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan sudah 100 %.

Adapun Faktor Pendorong nya Adalah sudah terintegrasi dengan SIPD.

Faktor Penghambat nya Adalah Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Adalah koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah Pengampu Terkait.

Berikut kami lampirkan Data Dukung sesuai tabel berikut :

**TABEL 2.9**  
 Daftar Kegiatan Pokir 2025 Per Fraksi DPRD

<b>No.</b>	<b>Fraksi</b>	<b>Tahun 2025</b>	
		<b>Jumlah pokir pokir yang terakomodir dalam dokumen perencanaan</b>	<b>Jumlah usulan kegiatan pokir DPRD</b>
1.	PDIP	465	465
2.	PKB	228	228
3.	GOLKAR	194	194
4.	GERINDRA	123	123
5.	PKS	129	129
6.	P3 + PAN	314	314
7.	NUSANTARA	160	160
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.613</b>	<b>1.613</b>

*Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025*

## 2. Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD yang seharusnya dipublikasikan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.0

Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan  
Tahun 2020 s/d 2025(sampai dengan Triwulan III tahun 2025)

No.	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	<b>373</b>	<b>304</b>	<b>357</b>	<b>250</b>	<b>335</b>	<b>235</b>
	- Rapat Paripurna	30	26	26	30	33	15
	- Rapat Komisi	35	44	60	45	46	42
	- Rapat Pansus	44	35	53	37	37	26
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	2	2	1	4
	- Rapat Badan Anggaran	15	9	12	10	10	6
	- Rapat Badan Musyawarah	9	8	8	11	14	10
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	5	2	1	8	10	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	144	44	60	40	50	40
	- Penyerapan aspirasi/reses	90	135	135	81	134	90
<b>2.</b>	<b>Jumlah kegiatan DPRD yang seharusnya dipublikasikan</b>	<b>473</b>	<b>370</b>	<b>405</b>	<b>250</b>	<b>335</b>	<b>235</b>
	- Rapat Paripurna	30	26	26	22	33	15
	- Rapat Komisi	66	76	79	45	46	42
	- Rapat Pansus	57	44	60	35	37	26
	- Rapat Badan Kehormatan	1	2	7	2	1	4
	- Rapat Badan Anggaran	19	12	14	8	10	6
	- Rapat Badan Musyawarah	12	11	11	11	14	10
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	5	2	1	6	10	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	193	62	72	55	50	40
	- Penyerapan aspirasi/reses	90	135	135	76	134	90
<b>3.</b>	<b>% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	<b>78,86</b>	<b>82,16</b>	<b>88,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) adalah sebesar 100 %.

Faktor Pendukungnya adalah kemudahan teknologi dan informasi dalam mempublikasikan kegiatan DPRD.

Faktor Penghambatnya adalah Kebijakan yang mengatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dewan yang tidak boleh di publikasikan.

Upaya Pencapaian Target adalah menjaga intensitas dan kualitas kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

TABEL 3.1

**Daftar Publikasi Kegiatan DPRD  
Tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025)**

<b>No.</b>	<b>Media Publikasi</b>	<b>Jumlah Publikasi</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	Majalah/Buletin	94	60	55	33	20	-
2.	Kalender	75	75	70	50	-	-
3.	Instagram	-	-	-	-	131	117
4.	Koran	37	36	36	23	84	-
5.	Temanggung TV	55	40	45	8	8	-
6.	Media online	112	93	151	136	92	118
	<b>jumlah</b>	<b>373</b>	<b>304</b>	<b>357</b>	<b>250</b>	<b>335</b>	<b>235</b>

*Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2025*

### 3. Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang direncanakan

Kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam proses legislasi, pengawasan dan representasi.

Kegiatan ini dapat meliputi :

- Pelatihan dan workshop : Pelatihan dan workshop yang dirancang untuk meniungkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota DPRD dalam bidang tertentu, seperti legislasi, pengawasan, dan komunikasi.
- Studi banding kedaerah lain atau lembaga lain untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam pemerintahan dan legislasi.

- Rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan ahli, untuk memperoleh informasi dan perspektif yang beragam.

Sehingga tujuan kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD, serta meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam mewakili kepentingan masyarakat.

Rumus kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD (6 Kegiatan ) dibagi kegiatan peningkatan anggota DPRD yang diterima (6 kegiatan) dikali 100.

TABEL 3.1

Daftar Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025)

No.	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	6	6	6	6	6	6
2.	Kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD yang diterima	6	6	6	6	3	6
	%	100	100	100	100	50	100

Sumber : Setwan 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD pada tahun 2020 - 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) adalah sebesar 100 %.

Faktor Pendorongnya adalah Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan agenda kegiatan setiap bulan melalui Rapat Bamus yang dilaksanakan tepat waktu.

Adapun Faktor Penghambat adalah Adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024 – 2029.

Upaya Pencapaian Target Kinerja adalah Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

Berikut kami lampirkan Data Dukung sebagai berikut :

TABEL 3.2

Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 2025

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
		<b>Jumlah Peningkatan Kapasitas yang terakomodir</b>	<b>Jumlah Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD yang diterima</b>
1.	Tugas Pokok dan Fungsi alat – alat Kelengkapan DPRD Semarang, 26-28 Februari 2025	1	1
2.	Optimalisasi tugas pokok dan fungsi DPRD Kab. Tmg Jakarta, 19 – 23 Mei 2025	1	1
3.	Penerapan Standart harga satuan nasional berdasarkan Perpres no 72 Tahun 2025 , Semarang 22 – 24 September 2025	1	1
4.	Pendalaman Tugas anggota DPRD Kab. Temanggung oleh BPSDMD Propinsi Jawa Tengah	1	1
5.	Bintek Partai	1	1
6.	Bintek Partai	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Sumber : Setwan 2025

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat DPRD dari 5 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Hal ini disebabkan karena adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024 – 2029 dan juga adanya beberapa agenda kegiatan yang bersamaan.

- Indikator persentase jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas.

Hal ini disebabkan karena harmonisasi yang membutuhkan proses waktu.

- Presentase Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai Rencana.

Hal ini disebabkan karena Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu.

- Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.

Hal ini disebabkan karena Adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024-2029.

- Presentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan.

Hal ini disebabkan karena Kebijakan yang mengatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dewan tidak boleh dipublikasikan .

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, antara lain :

- Keterbatasan sumber daya seperti staf dan fasilitas yang dapat menghambat kinerja secretariat DPRD.

- Koordinasi yang kurang efektif antara secretariat DPRD dengan anggota DPRD dan Pemerintah daerah

3. Optimalisasi Sumber Daya dan Koordinasi untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD.

## 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan pagu anggaran dibeberapa program dan kegiatan di Sekretariat DPRD untuk memenuhi kebutuhan belanja.
2. Penambahan pagu anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan belanja dan merupakan hasil usulan koreksi dari rancangan awal RKPD Tahun 2026.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 3.3  
*Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026*

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>51.864.660.505</b>	1	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>52.001.926.284,00</b>		
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>51.864.660.505</b>		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>52.001.926.284,00</b>		
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>51.864.660.505</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>52.001.926.284,00</b>		
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>35.004.303.842</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
1	[ Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian] ]	Kab. Temanggung	<b>Persentase ketersedia an administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah</b>	100	%	<b>35.004.303.842</b>	1.	[ Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian] ]				5	dokumen	<b>35.141.569.621,00</b>	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Org/bln	-	<b>2.579.999.110</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>2.579.999.110,00</b>	
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Temanggung				<b>545.130.500</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>545.130.500,00</b>	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	25.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung				790.150.421		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					831.336.400,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					676.722.500		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					676.722.500,00	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					30.005.301.311		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					29.963.381.111,00	
	Layanan Administrasi DPRD					382.000.000		Layanan Administrasi DPRD					520.000.000,00	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					16.860.356.663		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					16.860.356.663,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	[ Meningka tnya kualitas persidang an dan kajian peraturan perundang- undangan ]	Kab. Temanggung	Pe rse nta se ju ml ah ra nc an ga n Pe rat ur an Da era h ya ng di b ah as  Perse ntase e kegiatan DPRD yang dipublika sikan  Per se nta se kegi atan peni ngk atan kap	100	%	16.860.356.663		[ Meningka tnya kualitas persidang an dan kajian peraturan perundang- undangan ]					16.860.356.663,00	



RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketara ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			asit as ang gota DPR D  Persentas e kegiatan Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanak an Sesuai Rencana											
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Temanggun g				3.491.135.000		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					3.491.135.000,00	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran					799.026.000		Pembahasan Kebijakan Anggaran					799.026.000,00	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					90.000.000		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					90.000.000,00	



RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Kapasitas DPRD					3.315.332.713		Peningkatan Kapasitas DPRD					3.315.332.713,00	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					1.550.000.000		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					1.550.000.000,00	
	Fasilitasi Tugas DPRD					7.614.862.950		Fasilitasi Tugas DPRD					7.614.862.950,00	
	<b>J U M L A H</b>					<b>51.864.660.505</b>		<b>J U M L A H</b>					<b>52.001.926.284,00</b>	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (APABILA ADA)

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan **bukan oleh Sekretariat DPRD**. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 3.4

### Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## 2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Sekretariat DPRD ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2024-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
	CONTOH						
1	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Setwan	APBD	Penanganan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum	Produk Hukum	Meningkatnya jumlah dokumentasi dan informasi hukum	Setwan 2024

## 2.7 Penghargaan

**Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 3 tahun ini tidak ada Penghargaan .**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat DPRD lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

Tujuan Sekretariat DPRD yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029 adalah “Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD Secara Optimal”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Sekretariat DPRD .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh (Sekretariat DPRD)
3. Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
4. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat DPRD Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja**  
**SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Publik	<b>Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum, dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (ex BAU)	Angka	<b>100</b>	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD Secara Optimal	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd</b>	Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	<b>90</b>	
			Persentase Kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai Rencana	%	<b>95</b>	
			Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan		<b>100</b>	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD		<b>100</b>	

*Sumber : Renstra Setwan Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.*

Kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Sekretariat DPRD Kab. Temanggung Tahun 2026

<b>RANCANGAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2026</b>		<b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026</b>		( + / - )		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	52.001.926.284,00	A	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	52.001.926.284,00	
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	52.001.926.284,00		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	52.001.926.284,00	
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	52.001.926.284,00		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	52.001.926.284,00	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	35.141.569.621,00	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	35.141.569.621,00	
	[ Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian ]	35.141.569.621,00		[ Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian ]	35.141.569.621,00	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2.579.999.110,00		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2.579.999.110,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.999.110,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.999.110,00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	545.130.500,00		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	545.130.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.130.500,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.130.500,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	25.000.000,00		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	25.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	



RANCANGAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			( + / - )
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>831.336.400,00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>831.336.400,00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.760.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.760.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	692.576.400,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	692.576.400,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>676.722.500,00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>676.722.500,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	481.722.500,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	481.722.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>29.963.381.111,00</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>29.963.381.111,00</b>	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29.415.301.111,00		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29.415.301.111,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	458.080.000,00		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	458.080.000,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00	
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>520.000.000,00</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>520.000.000,00</b>	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.000.000,00		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.000.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	420.000.000,00		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	420.000.000,00	
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>16.860.356.663,00</b>		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>16.860.356.663,00</b>	
	( Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang – undangan ) :			( Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang – undangan ) :		
	Persentase Jumlah Raperda yang dibahas			Persentase Jumlah Raperda yang dibahas		
	Persentase Kegiatan DPRD yang diPublikasikan			Persentase Kegiatan DPRD yang diPublikasikan		
		16.860.356.663,00			16.860.356.663,00	

RANCANGAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			( + / - )
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	<b>Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD</b> <b>Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana</b>			<b>Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD</b> <b>Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana</b>		
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>3.491.135.000,00</b>		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>3.491.135.000,00</b>	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.850.000.000,00		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.850.000.000,00	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	525.000.000,00		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	525.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1.116.135.000,00		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1.116.135.000,00	
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>799.026.000,00</b>		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>799.026.000,00</b>	
	Pembahasan KUA dan PPAS	261.687.000,00		Pembahasan KUA dan PPAS	261.687.000,00	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	261.687.000,00		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	261.687.000,00	
	Pembahasan APBD	137.826.000,00		Pembahasan APBD	137.826.000,00	
	Pembahasan APBD Perubahan	137.826.000,00		Pembahasan APBD Perubahan	137.826.000,00	
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>90.000.000,00</b>		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>90.000.000,00</b>	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	22.000.000,00		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	22.000.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	22.000.000,00		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	22.000.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	22.000.000,00		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	22.000.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24.000.000,00		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24.000.000,00	
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>3.315.332.713,00</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>3.315.332.713,00</b>	
	Pendalaman Tugas DPRD	2.893.161.113,00		Pendalaman Tugas DPRD	2.893.161.113,00	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	222.171.600,00		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	222.171.600,00	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	200.000.000,00		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	200.000.000,00	



RANCANGAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			( + / - )
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	( Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan )	16.860.356.663,00		( Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan )	16.860.356.663,00	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.550.000.000,00		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.550.000.000,00	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	125.000.000,00		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	125.000.000,00	
	Pelaksanaan Reses	1.425.000.000,00		Pelaksanaan Reses	1.425.000.000,00	
	Fasilitasi Tugas DPRD	7.614.862.950,00		Fasilitasi Tugas DPRD	7.614.862.950,00	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.614.862.950,00		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.614.862.950,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>52.001.926.284,00</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>52.001.926.284,00</b>	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp 3.039.263.802 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Rp. 3.039.263.802 ( 52.001.926.284 ( 2026 ) – 48.962.662.482 ( 2025 ) dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD .



**Tabel 3.8**  
**Rencana Program dan Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Kab. Temanggung**  
**Tahun 2026**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur		
	SEKRETARIAT DPRD								52.001.926.284				55.643.166.571
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								52.001.926.284				55.643.166.571
4.02	SEKRETARIAT DPR								52.001.926.284				55.643.166.571
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								35.141.569.621				35.591.789.096
	[ Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian ]		Presentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah						35.141.569.621				35.591.789.096
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.579.999.110				2.837.999.021
4.02.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						2.579.999.110				2.837.999.021
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								545.130.500				674.959.300
4.02.01.2.06	Penyediaan Kompor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						5.000.000				10.000.000
4.02.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								15.000.000				20.000.000
4.02.01.2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								15.000.000				20.000.000
4.02.01.2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumentasi bahan bacaan dan peraturan						15.000.000				20.000.000



			perundang- undangan yang disediakan											
4.02.01.2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu								100.000.000					110.000.000
4.02.01.2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD						395.130.500					494.959.300
4.02.01.2.07	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								25.000.000					50.000.000
4.02.01.2.07 6	Penggandaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						25.000.000					50.000.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								831.336.400					861.529.464
4.02.01.2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								8.760.000					10.000.000
4.02.01.2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan						130.000.000					135.000.000
4.02.01.2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						692.576.400					716.529.464
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								676.722.500					720.000.000
4.02.01.2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya						481.722.500					500.000.000
4.02.01.2.09 9	Pemeliharaan/Rehabisi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabisi						85.000.000					100.000.000
4.02.01.2.09 10	Pemeliharaan/Rehabisi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang						85.000.000					90.000.000

			dipelihara/direha si											
4.02.01.2.09 1	Pemeliharaan/Rehal si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direha si						25.000.000					30.000.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD								29.963.381.111					30.055.301.311
4.02.01.2.15 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD						29.415.301.111					29.415.301.311
4.02.01.2.15 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan						458.080.000					550.000.000
4.02.01.2.15 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD						90.000.000					90.000.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD								520.000.000					392.000.000
4.02.01.2.16 3	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD						100.000.000					110.000.000
4.02.01.2.16 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan						420.000.000					282.000.000
4.02.02	PROGRAM DUKUN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								16.860.356.663					20.051.377.475
	[ Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kegiatan Peraturan Perundang-undangan ]		Persentase jumlah rancangan peraturan daerah yang dibuat Persentase kegiatan DPRD yang dipulikasi Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD Persentase kegiatan pokok-pokok pikiran dilaksanakan sesuai rencana						16.860.356.663					20.051.377.475



4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD							3.491.135.000						3.840.248.500
4.02.02.2.01 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumentasi hasil pembahasan rancangan peraturan daerah					1.850.000.000						2.035.000.000
4.02.02.2.01 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumentasi kajian perundang-undangan					525.000.000						577.500.000
4.02.02.2.01 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah dokumentasi hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ naskah akademik yang difasilitasi					1.116.135.000						1.227.748.500
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran							799.026.000						799.026.000
4.02.02.2.02 1	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumentasi hasil pembahasan KUA dan PPAS					261.687.000						261.687.000
4.02.02.2.02 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumentasi hasil pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS					261.687.000						261.687.000
4.02.02.2.02 3	Pembahasan APBD		Jumlah dokumentasi hasil pembahasan APBD					137.826.000						137.826.000
4.02.02.2.02 4	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumentasi hasil pembahasan APBD perubahan					137.826.000						137.826.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							90.000.000						184.000.000
4.02.02.2.03 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidan Pemerintahan dan Hukum		Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidan pemerintahan dan hukum					22.000.000						44.000.000
4.02.02.2.03 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidan Infrastruktur		Jumlah laporan pengawasan urusan bidang infrastruktur					22.000.000						44.000.000
4.02.02.2.03 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat					22.000.000						44.000.000
4.02.02.2.03 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidan Perekonomian		Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidan perekonomian					24.000.000						52.000.000
4.02.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD							3.315.332.713						3.349.171.600



4.02.02.2.04 2	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD						2.893.161.113						2.927.000.000
4.02.02.2.04 5	Penyediaan Tenaga Fraksi		Jumlah tenaga a fraksi						222.171.600						222.171.600
4.02.02.2.04 8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD								200.000.000						200.000.000
	[ Meningkatnya Kual Penganggaran dan Pengawasan ]		Persentase laporan pembahasan kebijakan anggaran Persentase laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD						16.860.356.663						20.051.377.475
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspi Masyarakat								1.550.000.000						1.685.225.700
4.02.02.2.05 2	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD		Jumlah dokumentasi pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun						125.000.000						125.000.000
4.02.02.2.05 3	Pelaksanaan Reses								1.425.000.000						1.560.225.700
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPR								7.614.862.950						10.193.705.675
4.02.02.2.08 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah dokumentasi hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD						7.614.862.950						10.193.705.675
JUMLAH									52.001.926.284					55.643.166.271	

Sumber Data : Hasil Cetakan Renja Pada SIPD RI



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat DPRD untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 80,04 %, yaitu realisasi belanja Sebesar 42.552.063.766 dari APBD sebesar 53.495.825.817, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 39,02 %, yaitu dari jumlah realisasi sebesar 18.788.529.008 dari APBD sebesar 48.394.785.385 .

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 52.001.926.284 yang terdiri dari 2 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

